

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN PENDUDUK DI PROVINSI ACEH

Diana Sapha A.H dan Cut Endang K

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Jl. Teuku Nyak Arief

dsapha78@gmail.com, cutendang28@gmail.com

Abstract : *This study aims to identify and analyze the effect of government education expenditure, government health expenditure and government infrastructure expenditure (housing and public facilities) on Human Development Index (HDI) in Aceh Province as an indicator of public welfare. The scope of study is 23 districts/cities in Aceh Province by using secondary data over period 2010-2013. The model used is multiple linear regression using panel data with Random Effect Model. The results show factors that influence on public welfare in Aceh Province are measured by Human Development Index significantly government education expenditure and government health expenditure. While government infrastructure expenditure (housing and public facilities) does not significantly influence the significance level of 5 percent but significant at 10 percent of the Human Development Index (HDI) of Aceh Province. From these results, this study suggests for local government in Aceh to pay attention to the budget set to be better allocated so that the Human Development Index (HDI) or public welfare in Aceh Province will improve.*

Keyword : *public welfare, HDI, government expenditure, panel, REM*

Abstrak : *Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur (Perumahan dan Fasilitas Umum) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh sebagai indikator kesejahteraan penduduk. Ruang lingkup penelitian yaitu 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dengan menggunakan data sekunder selama tahun 2010-2013. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda yang menggunakan data panel dengan Random Effect Model. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan adalah belanja pemerintah sektor pendidikan dan belanja pemerintah sektor kesehatan. Sedangkan belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan pemerintah daerah di Aceh untuk memperhatikan anggaran belanja yang telah ditetapkan agar dialokasikan secara lebih baik agar Indeks Pembangunan Manusia atau kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh meningkat.*

Kata Kunci : *kesejahteraan penduduk, IPM, belanja pemerintah, data panel, REM*

Pada dasarnya sebelum tahun 1970-an, pembangunan dilakukan untuk meningkatkan perekonomian, di mana tinggi rendahnya pembangunan suatu negara hanya diukur melalui tingkat pertumbuhan GNI (*Gross National Income*). Namun ternyata pendekatan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi seringkali mengabaikan faktor manusia dan sosial budaya sehingga menimbulkan ketimpangan sosial ekonomi (Todaro dan Smith, 2006). Dengan persoalan itu, akhirnya tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi bergeser dari pendekatan pertumbuhan ekonomi (*growth*) menjadi pendekatan pembangunan manusia (*human centered development*).

Saat ini di sebagian besar negara, baik negara maju dan berkembang menggunakan sebuah indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)*. Indeks ini didasarkan pada pendekatan Amartya Sen untuk lebih memahami kesejahteraan manusia dengan menekankan pembangunan harus lebih memperhatikan peningkatan kualitas hidup dan kebebasan masyarakat (Sen dalam Todaro dan Smith, 2006).

IPM telah menjadi alat utama untuk mengukur kesejahteraan manusia. Dalam pendekatan ini, pembangunan manusia tidak hanya terbatas pada aspek pendapatan tetapi juga dengan variabel kesejahteraan lainnya yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup manusia. Variabel-variabel ini termasuk kesehatan dan pendidikan (Kusharjanto dan Kim, 2011).

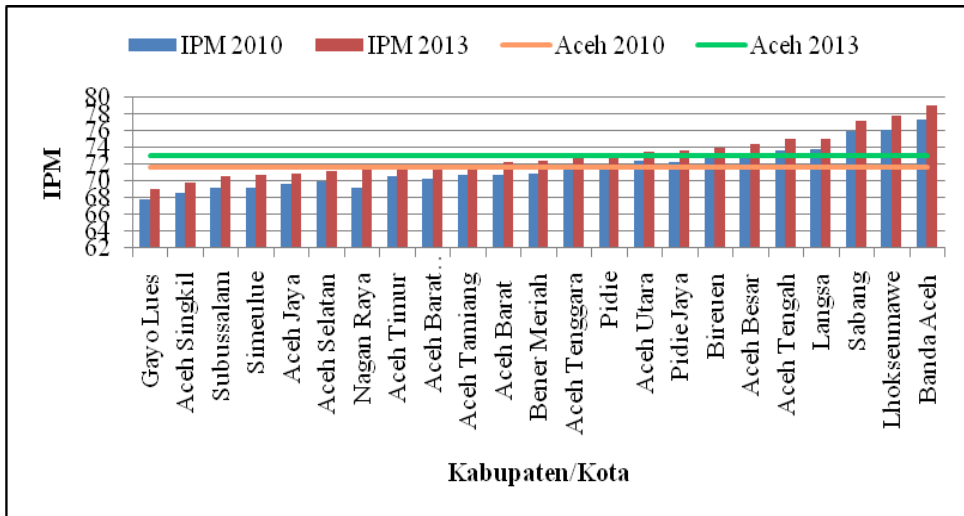
Secara rata-rata IPM negara-negara ASEAN meningkat selama 4 tahun terakhir. IPM Indonesia berada pada urutan kelima setelah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Populasi penduduk di Indonesia sangat tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduknya. Begitu juga dengan salah satu provinsi di Indonesia, pencapaian IPM Provinsi Aceh belum optimal sebagai daerah yang memiliki kualitas IPM yang baik sebab sebagian daerah dari 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh terdapat 12 kabupaten dan 1 kota memiliki IPM di bawah rata-rata provinsi.

Aceh termasuk provinsi di Indonesia yang memperhatikan perkembangan kualitas manusianya. Hal itu terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025 yang mengharapkan kondisi Aceh lebih sejahtera.

Disebutkan dalam RPJP Aceh, masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha dan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik. Pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh terus berupaya mewujudkan visi tersebut berupa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perkembangan IPM di Provinsi Aceh dari tahun 2010-2013 terus mengalami kenaikan terlihat pada Gambar 1.1. Pada tahun 2010 IPM Aceh sebesar 71,70 kemudian terus naik hingga tahun 2013 mencapai 73,05. Ini berarti bahwa secara umum terdapat peningkatan kesejahteraan di Aceh. Walaupun terjadi peningkatan, capaian IPM Provinsi Aceh belum dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki kualitas IPM yang baik sebab sebagian daerah dari 23

kabupaten/kota Provinsi Aceh terdapat 12 kabupaten dan 1 kota memiliki IPM di bawah rata-rata provinsi. Daerah-daerah tersebut ialah Kabupaten Gayo Lues, Aceh Singkil, Simeuleu, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya, Aceh Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Kota Subussalam.



Sumber : BPS Aceh (2014)

Gambar 1. IPM 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2013

Apabila diamati lebih lanjut secara spasial antar 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, terjadi perbedaan peningkatan IPM yang cukup signifikan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Kabupaten Gayo Lues mempunyai IPM terendah sedangkan yang tertinggi berada di Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2010-2013. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan variasi IPM Provinsi Aceh masih relatif besar yang berarti kesejahteraan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh relatif belum merata dan perlu ditangani.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan selain dari pada pembangunan manusia, dalam hal ini peran pemerintah juga sangat penting. Peranan pemerintah menurut Reksohadiprodjo (2001) terbagi atas tiga yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Peranan pemerintah dalam perekonomian juga tampak dari sisi pengeluarannya yakni belanja pemerintah (G). Pengaruh belanja pemerintah cukup besar bagi perekonomian negara-negara anggota Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan juga negara berkembang karena hampir 40 persen dari *gross domestic product* (GDP) negara tersebut adalah belanja publik (Hall, 2010).

Belanja pelayanan umum merupakan porsi terbesar dalam struktur belanja pemerintah di Provinsi Aceh mencapai Rp 4,31 triliun pada tahun 2013. Sementara itu belanja pemerintah sektor publik lain seperti belanja pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan yang sangat erat terkait dengan proses pembangunan manusia justru mendapat alokasi anggaran relatif sedikit, sekitar 1

triliun rupiah. Hanya alokasi belanja sektor infrastruktur yang dalam penelitian ini diproksi dengan belanja pemerintah fungsi perumahan dan fasilitas umum yang menunjukkan peningkatan cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Aceh belum optimal dalam mengalokasikan dana untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia (IPM).

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk membahasnya lebih dalam sejauh mana pengaruh belanja pemerintah ketiga sektor publik (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator kesejahteraan penduduk yang digunakan.

TINJAUAN LITERATUR

Pengeluaran Pemerintah

Teori-teori terdahulu yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave, yang menghubungkan perkembangan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi. Selanjutnya dalam hukum Wagner menjelaskan bahwa perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar terhadap GNP. Di mana semakin meningkatnya pendapatan per kapita maka secara relatif akan meningkatkan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

Belanja Daerah

Yani (2004) menggolongkan belanja daerah berdasarkan : (1) Klasifikasi menurut organisasi, yaitu suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, serta dinas daerah dan lembaga teknis lainnya. (2) Klasifikasi menurut fungsi, yaitu belanja yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari : Pelayanan umum, ketertiban dan ketentraman, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, perlindungan sosial. (3) Klasifikasi ekonomi (jenis belanja), seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal atau pembangunan.

Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Kebijakan pemerintah untuk merealisasikan upaya peningkatan pendidikan ditunjukkan dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengalokasian anggaran belanja fungsi pendidikan minimal 20 persen dari total APBN atau APBD. Untuk di Aceh, ketentuan anggaran belanja sektor pendidikan diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 pasal 4 ayat 2 bahwa minimal 30 persen dari pendapatan yang diterima dialokasikan untuk sektor pendidikan di Aceh dan 70 persen untuk sektor lain.

Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan

Adapun pasal 171 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat pembiayaan sektor kesehatan sebagai berikut (Sapha, 2012) : (1) Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5 persen dari APBN di luar gaji. (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar gaji. (3) Besar anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik minimal dua per tiga dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur

Infrastruktur berkontribusi langsung terhadap kondisi kehidupan, tidak hanya meningkatkan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga melalui penyediaan berbagai fasilitas yang baik diperlukan untuk eksistensi manusia (Todaro, 2006). Sebagai bagian dari infrastruktur, pembangunan perumahan merupakan cara untuk terpenuhinya kebutuhan dasar bagi masyarakat Indonesia. Rumah yang sehat dan nyaman akan memberikan dampak bagi kesehatan para penghuninya sehingga membuat individu menjadi produktif dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu perumahan harus disediakan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia (Suparmoko, 2002). Dalam pasal 119 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman menyebutkan sumber dana untuk pemenuhan kebutuhan rumah di desa atau kota berasal dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indikator keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari indikator moneter dan non moneter (Arsyad, 2004). Indikator moneter meliputi pendapatan perkapita dan kesejahteraan ekonomi bersih (*net economic welfare/NEW*) namun indikator tersebut memiliki kelemahan. Hal itu tampak pada pendapatan per kapita yang mengabaikan faktor di luar pendapatan. Dengan kelemahan tersebut digunakan indikator pembangunan non moneter yang meliputi indikator sosial dan Indeks Kualitas Hidup (IKH) serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dalam Kuncoro (2004) adalah indeks gabungan dari tiga indikator : (1) Masa hidup (*longevity*) yang diukur dengan usia harapan hidup. (2) Pengetahuan (*knowledge*) yang diukur dengan dua indikator yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. (3) Standar kehidupan yang layak (*standard of living*) yang diukur dengan indikator tingkat konsumsi riil per kapita yang disesuaikan.

Penelitian Sebelumnya

Darwin (2009) menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh.

Fattah dan Muji (2012) melakukan pengamatan pada Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari tahun 1998-2007 dengan model regresi berganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jeneponto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur memiliki efek positif dan signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Hamzah dkk. (2012) mengkaji kualitas pembangunan manusia dan permasalahannya di Indonesia dengan menggunakan metode regresi data panel dari tahun 1993-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, pertumbuhan penduduk, pengangguran dan alokasi dana bidang pendidikan serta variabel dummy otonomi daerah. Sedangkan variabel distribusi pendapatan, jumlah penduduk miskin, alokasi dana bidang kesehatan dan alokasi dana bidang lingkungan serta alokasi dana bidang perumahan dan fasilitas umum tidak signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam pembahasannya peneliti memasukkan faktor-faktor yang berpengaruh untuk penelitian ini antara lain belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan, dan belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) sebagai variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu tingkat kesejahteraan penduduk yang di proksikan ke dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data sekunder. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan website Kementerian Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id). Jenis data yang digunakan adalah data panel yang berupa gabungan data *cross section* yaitu 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh dan data *time series* sebanyak 4 tahun dimulai dari tahun 2010-2013. Total seluruh data sebanyak 92 data panel.

Model Analisis

Dengan menggunakan data panel, model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data panel dengan model analisis regresi berganda (*multiple regression*), sehingga model dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta X_{it} + \varepsilon_{it}, i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

Dengan fungsi matematis :

$$IPM = f (BP, BK, BI) \quad (2)$$

Kemudian model ditransformasikan dalam bentuk *semilog*.

$$IPM_{it} = \alpha_0 + \beta_1 \text{Log BP}_{it} + \beta_2 \text{Log BK}_{it} + \beta_3 \text{Log BI}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Dimana : IPM adalah Indeks Pembangunan Manusia, α_0 adalah konstanta, β_1 sampai β_3 adalah koefisien regresi, BP adalah belanja pemerintah sektor pendidikan (rupiah), BK adalah belanja pemerintah sektor kesehatan (rupiah), BI adalah belanja pemerintah sektor infrastruktur (rupiah), i adalah kabupaten/kota, t adalah runtun waktu (tahun), dan ε adalah *error term*.

Definisi Operasional Variabel

Adapun defnisi operasional dalam jural ini adalah (1). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indeks yang menggambarkan pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah sebagai wujud peningkatan kesejahteraan penduduk. Dalam penelitian ini adalah IPM 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2010-2013. (2) Belanja pemerintah sektor pendidikan adalah besarnya belanja pemerintah menurut fungsi sektor pendidikan pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh tahun dari 2010-2013 dalam satuan rupiah. (3) Belanja pemerintah sektor kesehatan adalah besarnya belanja pemerintah menurut fungsi sektor kesehatan pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2010-2013 dalam satuan rupiah. (4) Belanja pemerintah sektor infrastruktur adalah besarnya belanja pemerintah menurut fungsi sektor perumahan dan fasilitas umum pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2010-2013 dalam satuan rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Menurut Komponen

Secara garis besar, perkembangan IPM di semua kabupaten dan kota Provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini turut serta membantu usaha peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Aceh. IPM Aceh meningkat dari tahun 2010-2013 yakni 71,70 pada tahun 2010 menjadi 73,05 pada tahun 2013.

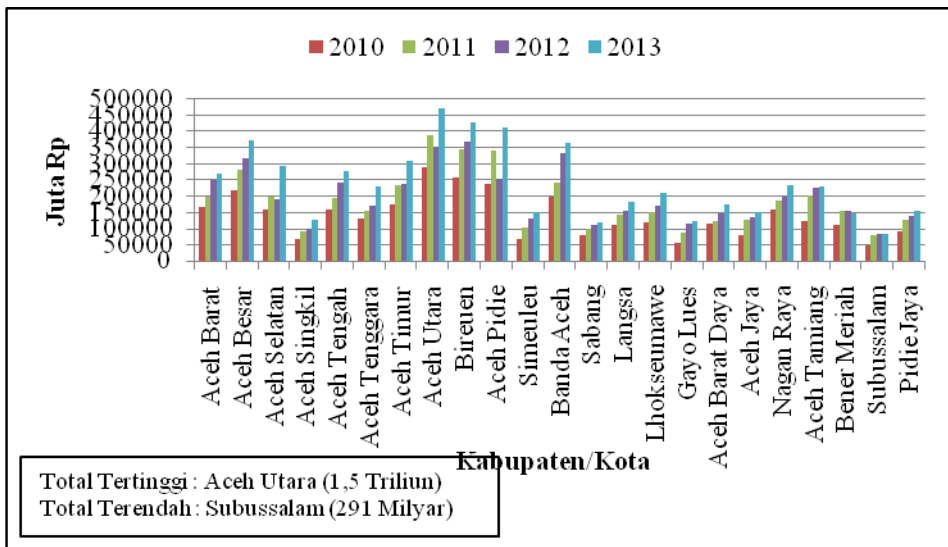
Wilayah yang memiliki IPM tertinggi di Provinsi Aceh selama tahun 2010-2013 adalah Kota Banda Aceh sedangkan wilayah dengan IPM terendah adalah Kabupaten Gayo Lues. Hal ini menandakan bahwa Kota Banda Aceh cukup sejahtera sebab Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang tersedia banyak fasilitas dan sarana lengkap, sehingga kualitas penduduk Kota Banda Aceh lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas penduduk yang berada pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.

Secara rinci peningkatan IPM diperoleh dari peningkatan komponen penyusun IPM yaitu angka harapan hidup (AHH), angka melek huruf (AMH), rata-rata lama sekolah (RRLS) dan kemampuan daya beli masyarakat (PPP). Komponen angka harapan hidup (AHH) tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Bireuen. Kemudian indeks pendidikan yang terbagi ke dalam dua indikator yaitu angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RRLS) cenderung tinggi

dimiliki oleh wilayah perkotaan, masing-masing Kota Lhokseumawe dan Kota Banda Aceh. Dan terakhir komponen kemampuan daya beli masyarakat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang mewakili standar kehidupan layak paling tinggi dimiliki Kota Banda Aceh.

Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan

Perkembangan belanja pemerintah sektor pendidikan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2010-2013 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Wilayah yang memiliki belanja pemerintah tertinggi adalah Kabupaten Aceh Utara dengan total belanja mencapai Rp 1,5 triliun.

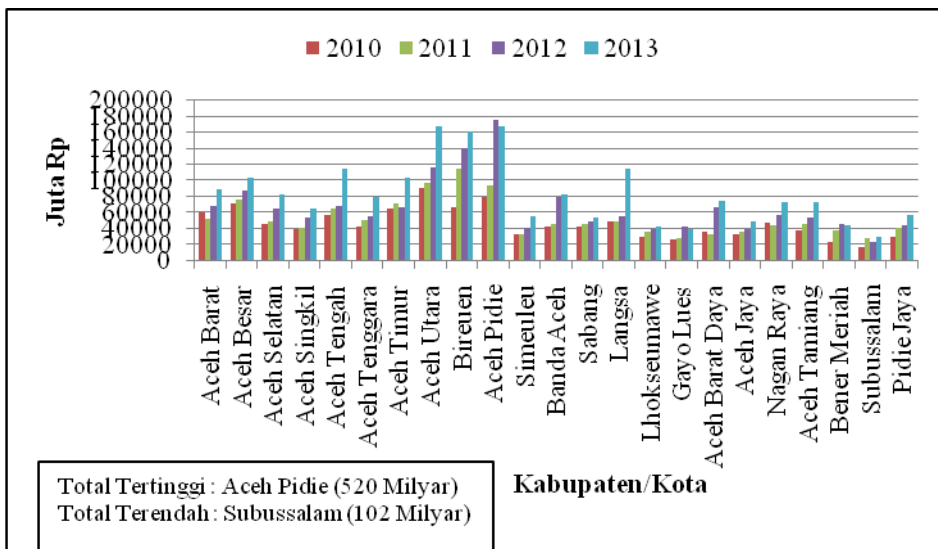


Sumber : *djpk.go.id* (2014)

Gambar 2. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan

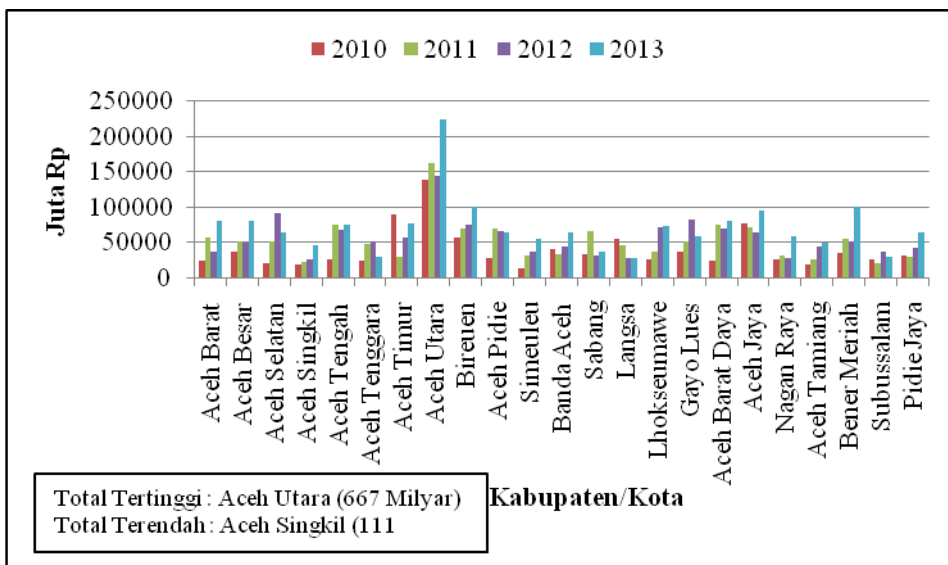
Perkembangan belanja pemerintah sektor kesehatan 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh selama tahun 2010-2013 mengalami peningkatan. Dari tahun 2010-2013, alokasi belanja pemerintah sektor kesehatan paling banyak adalah Kabupaten Aceh Pidie dengan total pengeluaran sebesar Rp 520 milyar, kemudian diikuti Kabupaten Bireuen dengan Rp 485 milyar. Belanja pemerintah sektor kesehatan yang cukup besar itu menjadikan Kabupaten Bireuen sebagai daerah yang memiliki angka harapan hidup tertinggi di Aceh.



Sumber : djpk.go.id (2014)

Gambar 3. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur



Sumber : djpk.go.id (2014)

Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

Dari tahun 2010-2013 hanya belanja pemerintah sektor infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Belanja pemerintah sektor infrastruktur merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk peningkatan akses penduduk terhadap layanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Total belanja pemerintah sektor infrastruktur terbanyak dimiliki Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar Rp 667 milyar. Sedangkan paling sedikit dimiliki Kabupaten Aceh Singkil sebesar Rp 111 milyar dari tahun 2010-2013.

Pengujian Hipotesis Variabel Bebas Terhadap Variabel Dependen (IPM)

Dari hasil uji *Lagrange Multiplier* tersebut dapat disimpulkan *random effect model* merupakan teknik analisis yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis data panel ini. Kemudian diperkuat dengan pertimbangan bahwa jumlah waktu yang digunakan dalam penelitian ini lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah individu (Nachrowi dan Usman, 2006). Hal ini terlihat dari jumlah waktu $T = 4$ tahun sedangkan individu $N = 23$ kabupaten/kota.

Tabel 1. Hasil Estimasi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.11093	3.209909	4.396054	0.0000 ^{**})
BP	3.086169	0.487088	6.335955	0.0000 ^{**})
BK	1.827862	0.413840	4.416837	0.0000 ^{**})
BI	0.368905	0.197799	1.865049	0.0655 ^{***})

Keterangan : ^{**}) signifikan pada $\alpha = 5\%$, ^{***}) signifikan pada $\alpha = 10\%$

Sumber : Hasil Pengolahan Data, *Eviews 7 (2015)*

Persamaan regresi yang terbentuk pada penelitian ini sebagai berikut :

$$\text{IPM} = 14.11093 + 3.086169 \text{ BP} + 1.827862 \text{ BK} + 0.368905 \text{ BI}$$

(0.0000) (0.0000) (0.0655)

$$R^2 = 0.803897$$

Persamaan ini menunjukkan nilai konstanta dari hasil regresi sebesar 14.11093 yang berarti tanpa kenaikan belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah sektor infrastruktur maka IPM kabupaten/kota di Provinsi Aceh sebagai indikator kesejahteraan penduduk, rata-rata hanya akan mencapai 14,11 poin.

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda data panel antara belanja pemerintah sektor pendidikan dengan IPM diperoleh nilai $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$, sehingga belanja pemerintah sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dan hasil ini sesuai dengan teori karena koefisien belanja pemerintah sektor pendidikan = 3.086169. Hal ini

berarti bahwa ketika belanja pemerintah sektor pendidikan meningkat sebesar 1 persen, IPM meningkat sebesar 3,08 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan.

Hasil yang sama didapatkan pada belanja pemerintah sektor kesehatan terhadap IPM di mana nilai $p\text{-value} = 0.0000 < 0.05$, sehingga belanja pemerintah sektor kesehatan berpengaruh signifikan terhadap IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dan hasil ini sesuai dengan teori karena koefisien belanja pemerintah sektor kesehatan adalah 1.827862. Hal ini berarti bahwa ketika belanja pemerintah sektor kesehatan meningkat sebesar 1 persen, maka IPM akan meningkat sebesar 1,83 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darwin (2009).

Dan untuk hasil regresi antara belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) terhadap IPM diperoleh nilai $p\text{-value} = 0.0655 > 0,05$, sehingga belanja pemerintah sektor infrastruktur tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Jadi meskipun pengaruhnya tidak signifikan, belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) tetap memiliki pengaruh terhadap IPM walaupun relatif kecil yakni 0.368905. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hamzah dkk. (2012) namun pengaruhnya berlawanan dari hasil penelitian Fattah dan Muji (2012). Hasil yang tidak signifikan tersebut dapat disebabkan dari hasil penelitian nilai koefisien belanja pemerintah sektor infrastruktur paling kecil di antara variabel bebas lainnya, sehingga ketika belanja pemerintah sektor infrastruktur meningkat sebesar 1 persen, maka pengaruhnya terhadap IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh hanya sebesar 0,37 poin.

Selain itu, koefisien determinasi (R^2) dalam penelitian ini sebesar 0,803897. Hal ini berarti variabel bebas yaitu belanja pemerintah sektor pendidikan, belanja pemerintah sektor kesehatan dan belanja pemerintah sektor infrastruktur mampu menjelaskan kesejahteraan penduduk yaitu IPM di Provinsi Aceh sebesar 80,39 persen, sedangkan sisanya sebesar 19,61 persen akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut : (1) Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia secara signifikan adalah belanja pemerintah sektor pendidikan dan belanja pemerintah sektor kesehatan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen. Sementara itu belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh. (2) Kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh ditentukan oleh 80,39 persen variabel-variabel belanja pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum).

Sedangkan sisanya sebesar 19,61 persen akan dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- _____. 2011. UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- _____. 2013. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang *Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus*.
- Arsyad, L. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. STIE YKPN, Yogyakarta.
- Darwin. 2009. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Skripsi (Tidak dipublikasikan)*. FE Unsyiah. Banda Aceh.
- Fattah, S dan Aspa Muji. 2012. *Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency*. *IOSR Journal Of Humanities And Social Science (JHSS)*. 5: 40-50.
- Hall, D. 2010. *Mengapa Kita Membutuhkan Belanja Publik*. Alih Bahasa. London : PSIRU University of Greenwich.
- Hamzah, Muhammad Zilal., Renny Risqiani dan Eleonora Sofilda. 2012. *Human Development Quality and Its Problems in Indonesia*. *OIDA International Journal of Sustainable Development*. 5 (7): 29-36.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Kusharjanto, H. dan Donghun Kim. 2011. *Infrastructure and Human Development : The Case of Java, Indonesia*. *Journal of The Asia Pasific Economy*. 16 (1): 111-124.
- Mangkoesobroto, G. 2001. *Ekonomi Publik*. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. LP FE Universitas Indonesia, Jakarta.
- Reksohadiprodo, S. 2001. *Ekonomika Publik*. Edisi 1. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sapha, Diana. 2012. Analisis Pengaruh Belanja Kesehatan Oleh Pemerintah Terhadap Derajat Kesehatan Masyarakat di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 3 (2): 93-111.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi 1. Andi, Yogyakarta.
- Todaro, M.P dan S.C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi 9 Jilid 2. Erlangga, Jakarta.
- Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- www.djpk.kemenkeu.go.id